

DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

THE IMPACT OF GENDER INEQUALITY ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Agnes Vera Yanti Sitorus

Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta
E-mail: agnes@bps.go.id

Abstract

There is no any region in a developing country where women have got equality in legal, social and economic rights (United Nations Development Programme, 2010). Gender inequality occurs in education, employment, access to resources, economy, power, and political participation. Women bear the heaviest burden as a result of inequality, but basically, inequality harms everyone, and ultimately hurts the economy of a country. This study aims to analyze gender inequality in Indonesia by using the Gender Development Index (GDI) and the Human Development Index (HDI). Descriptive analysis shows that there is a gender inequality, seen from the distance between HDI and GDI.

Keywords: *gender inequality, gender development index (GDI), human development index (HDI).*

Abstrak

Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga dimana perempuan telah menikmati kesetaraan yang sama dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi (United Nation Development Programme, 2010). Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketimpangan yang terjadi, namun pada dasarnya ketimpangan itu merugikan semua orang dan akhirnya merugikan perekonomian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender di Indonesia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ada ketimpangan gender, terlihat dari masih ada jarak antara IPM dan IPG.

Kata kunci: *ketimpangan gender, indeks ketimpangan gender (IPG), indeks pembangunan manusia (IPM).*

PENDAHULUAN

Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender (*gender equality*) berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara

perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Hubies, 2010).

Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada seluruh pejabat Negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia.

Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.

Saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam G20, ukurannya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia masuk peringkat ke-16 PDB terbesar di dunia. Pada tahun 2012 PDB Indonesia sebesar 8 242 triliun rupiah dan PDB perkapita sebesar 33,34 juta perkapita. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sekitar 4-6 persen per tahun selama dekade terakhir ini, di saat negara-negara maju mengalami krisis. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berkembang yang berpendapatan menengah dengan populasi penduduk yang sangat besar, menduduki peringkat keempat di dunia. Penelitian McKinsey Global Institute (2012) menyatakan bahwa Indonesia menuju tahapan bonus demografi, dimana kondisi struktur umur penduduk menjadikan dependency ratio berada pada tingkat yang rendah. Untuk mendapatkan manfaat besar tertinggi dari bonus demografi, sumber daya manusia harus baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, dan pendidikan. Menurut prediksinya bahwa pada tahun 2030

Indonesia diperkirakan dapat meraih peringkat ke-7 terbesar di dunia dengan mengandaikan kita memiliki sumber daya manusia terdidik dan perempuan juga masuk ke lapangan pekerjaan. Jika pemerintah mengabaikan kesetaraan gender, maka Indonesia dapat terjebak menjadi negara berpendapatan menengah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Walaupun demikian, tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah. Peran perempuan dalam pembangunan perlu terus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Karena peningkatan peran perempuan mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan. Perbaikan kualitas manusia perempuan khususnya pendidikan menjadi isu penting karena sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan demikian 'bagaimana dampak ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia' merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika indeks ketimpangan gender di Indonesia dan dampak indeks ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Konsep Gender

Menurut Handayani dan Sugiarti (2008), untuk menganalisis ketimpangan gender perlu didefinisikan terlebih dahulu pengertian gender dengan seks atau jenis kelamin. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara

biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada lelaki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat diatas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan.

United Nation Development Program (UNDP) menyusun tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui formula Human Development Index/HDI. Karena adanya isu kesetaraan gender kemudian menyusun formula baru yang mengakomodasi perspektif gender, yaitu *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). GDI merupakan variasi HDI yang disagregasi menurut jenis kelamin. Variabel-variabel yang membentuk GDI adalah merupakan variabel *Human Development Index* (HDI) yang dikhususkan pada pencapaian kaum perempuan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan per kapita (PPP). Sedangkan GEM lebih memfokuskan pencapaian perempuan

dalam lingkup sosial ekonomi dan politik. GEM secara eksplisit mengukur aktivitas pemberdayaan perempuan dalam politik, pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik menerbitkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang disesuaikan dengan GDI dan GEM. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan sama dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat juga digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penambahan nilai PDB riil dari waktu ke waktu, atau dapat juga diartikan sebagai meningkatnya kapasitas perekonomian suatu wilayah. Dalam kerangka regional, konsep PDB identik dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB atau PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Produk Domestik Regional Bruto dari sisi produksi disebut PDRB sektoral didefinisikan sebagai penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dengan pendekatan pendapatan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di semua sektor, berupa upah/gaji untuk pemilik tenaga kerja, bunga atau hasil

investasi bagi pemilik modal, sewa tanah bagi pemilik lahan serta keuntungan bagi pengusaha. Dari sisi pengeluaran, PDRB dihitung sebagai penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), serta ekspor bersih (X-M) (Dornbusch et al. 2008).

PDRB atas dasar harga konstan sering disebut sebagai PDRB riil dan mencerminkan nilai output yang dihitung dengan harga pada tahun dasar tertentu. Perubahan PDRB riil dari waktu ke waktu mencerminkan perubahan kuantitas dan sudah tidak mengandung unsur perubahan harga baik inflasi maupun deflasi. PDRB riil perkapita dihitung dari PDRB riil dibagi jumlah penduduk dalam waktu yang sama. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan nilai output (PDRB riil) dari waktu ke waktu.

Kaitan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi

Klasen dan Lemanna (2009) menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis *cross-country* dan panel di 124 negara. Penelitiannya menyimpulkan bahwa ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (*human capital*) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja.

Ketimpangan gender di pendidikan menyebabkan eksternalitas langsung. Pendidikan perempuan mempunyai efek eksternalitas positif atas kuantitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Peningkatan modal manusia

akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi fisik, selanjutnya akan meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender di pendidikan juga menyebabkan eksternalitas tidak langsung melalui efek demografi.

Ada empat mekanisme dampak demografi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, tingkat fertilitas rendah mengurangi angka beban ketergantungan dalam angkatan kerja (*dependency ratio*) sehingga meningkatkan suplai tabungan. Kedua, sejumlah besar penduduk memasuki angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk sebelumnya tinggi, akan mendorong permintaan investasi. Jika peningkatan permintaan didukung peningkatan tabungan domestik atau *capital inflow* akan mendorong ekspansi investasi dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bloom dan Williamson 1998). Ketiga, tingkat fertilitas rendah akan meningkatkan kontribusi penduduk usia kerja. Jika pertumbuhan tenaga kerja diserap oleh peningkatan pekerjaan, maka pertumbuhan perkapita akan meningkat walaupun upah dan produktivitas tetap sama. Fenomena ini hanya sementara (merujuk kepada Bloom dan Williamson 'demographic gift') karena setelah beberapa dekade penduduk usia kerja akan menurun sementara penduduk usia tua akan meningkat, sehingga meningkatkan angka ketergantungan. Keempat, Lagerlof (1999) menyimpulkan bahwa ada interaksi antara ketimpangan gender di pendidikan, kelahiran tinggi, investasi modal manusia rendah dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, dampak kelahiran terhadap pertumbuhan melalui investasi modal manusia generasi mendatang.

Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara/wilayah

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses teknologi juga akan meningkatkan produktivitas perempuan. Disamping itu, efek pengukuran juga berdampak pada ketimpangan gender. Ada banyak jenis pekerjaan perempuan tidak dimasukkan dalam *System of National Accounts* (SNA). Akibatnya, substitusi dari tenaga kerja rumah tangga (*invisible*) dengan pasar tenaga kerja (*visible*) tetap tidak ada peningkatan produktivitas, dampak pengukuran ini berimplikasi kebijakan (terukur atau tidak) dan output ekonomi tidak berubah.

Bali moune-Lutz (2008) menggunakan analisis data panel 41 negara Afrika dan Arab periode tahun 1974-2002 dan estimasi Arellano-Bond secara empirik menunjukkan dampak dua indikator utama MDG3 yaitu rasio pendidikan dasar dan menengah perempuan terhadap laki-laki dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki berusia 15-24 tahun terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam melek huruf berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender yang tinggi mempunyai dampak yang kuat terhadap pertumbuhan pendapatan di negara Arab. Dampak ketimpangan gender di pendidikan dasar dan menengah kurang menunjukkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah penelitian meliputi 30 provinsi di Indonesia selama tahun 2003-2012. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan provinsi antara lain PDRB riil perkapita, pertumbuhan ekonomi, investasi, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki,

tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterbukaan perdagangan (*openness*), indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks pembangunan gender (IPG).

Pendidikan diproksi dengan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki. Ketimpangan gender di pendidikan diproksi dengan rasio rata-rata lama sekolah penduduk perempuan terhadap laki-laki. Dengan asumsi, pengurangan ketimpangan di pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan kepada perempuan tanpa mengurangi pendidikan laki-laki (karena tingkat pendidikan laki-laki dianggap konstan). Ketimpangan gender di pekerjaan diproksi dengan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki. Selanjutnya, menurut *United Nation Development Program* (UNDP) tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui formula Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena adanya isu kesetaraan gender maka disusun formula baru yang mengakomodasi perspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio IPG terhadap IPM.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran tentang dinamika ketimpangan gender di provinsi dengan menggunakan IPG. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan gender yaitu IPG yang menunjukkan angka lebih rendah dibanding IPM. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan gender.

Dinamika indeks ketimpangan gender di Indonesia

Secara umum pencapaian pembangunan gender di Indonesia dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu 2004-2011. Pada tahun 2004 IPG secara nasional telah mencapai 63,94, kemudian naik menjadi 65,81 pada tahun 2007 dan bergerak naik lagi secara perlahan hingga menjadi 67,80 pada tahun 2011. Namun, peningkatan IPG

dalam kurun waktu 2004-2011 tersebut belum memberikan gambaran yang menggembirakan apabila dilihat dari pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPG selama kurun waktu tersebut masih belum mampu mengurangi jarak secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Gap antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Rasio (IPG/IPM), 2004-2011

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rasio (%)
2004	68,69	63,94	93,1
2005	69,57	65,13	93,6
2006	70,08	65,27	93,1
2007	70,59	65,81	93,2
2008	71,17	66,38	93,3
2009	71,76	66,77	93,0
2010	72,27	67,20	93,0
2011	72,77	67,80	93,2

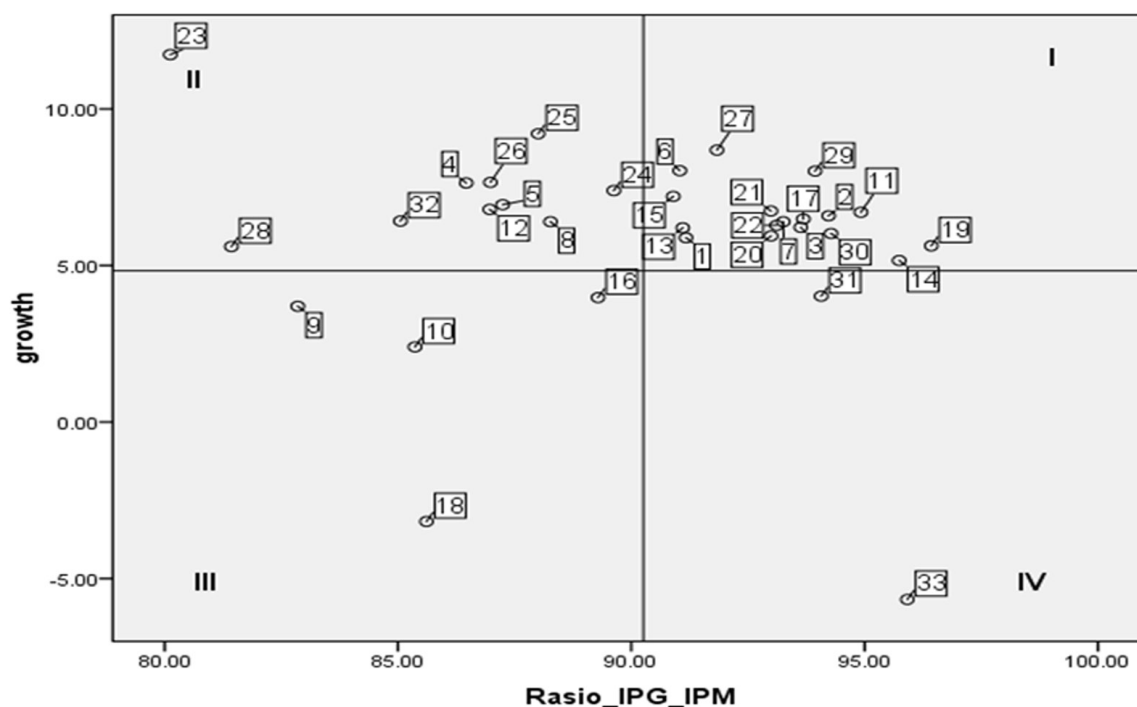
Sumber: Badan Pusat Statistik

Adanya perbedaan pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di tingkat nasional, tampaknya juga terjadi di tingkat provinsi. Fenomena ini dapat ditunjukkan melalui besaran angka IPG yang lebih rendah dibanding angka IPM di semua provinsi. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa persoalan ketimpangan gender masih terjadi di semua provinsi. Untuk mengetahui hubungan antar indeks ketimpangan gender provinsi dengan pertumbuhan ekonomi, dilakukan plotting dalam analisis kuadran.

Menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rasio (IPG/IPM) tahun 2011 sebagai tolok ukur, provinsi-provinsi di Indonesia tersebar ke dalam empat kelompok atau kuadran. Analisis kuadran menunjukkan

bahwa sebagian besar provinsi mulai menunjukkan hubungan rasio (IPG/IPM) dan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Tetapi, tidak sama halnya dengan provinsi di Kalimantan Timur, hubungan pertumbuhan ekonomi dan rasio (IPG/IPM) bertanda negatif.

Pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi rasio (IPG/IPM) rendah. Rendahnya rasio (IPG/IPM) menunjukkan masih tingginya ketimpangan gender di provinsi Kalimantan Timur. Data BPS menunjukkan IPM Kaltim sebesar 76,22 sementara IPG hanya sebesar 61,07. Salah satu penyebab rendahnya IPG di provinsi tersebut adalah kecilnya sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan, yaitu sebesar 21 persen.



Gambar 2 Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio (IPG/IPM), 2011

Keterangan: 1=NAD, 2=Sumut, 3=Sumbar, 4=Riau, 5=Jambi, 6=Sumsel, 7=Bengkulu, 8=Lampung, 9=Babel, 10=Kepri, 11=DKI Jakarta, 12=Jabar, 13=Jateng, 14=DI Yogyakarta, 15=Jatim, 16=Banten, 17=Bali, 18=NTB, 19=NTT, 20=Kalbar, 21=Kalteng, 22=Kalsel, 23=Kaltim, 24=Sulut, 25=Sulteng, 26=Sulsel, 27=Sumatra Utara, 28=Gorontalo, 29=Sulbar, 30=Maluku, 31=Malut, 32=Papua Barat, 33=Papua

Tabel 2 Pembagian Provinsi Menurut Growth dan Rasio (IPG/IPM), 2011

Kuadran	Growth	Rasio	Provinsi
I	Di atas rata-rata	Di atas rata-rata	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku
II	Di atas rata-rata	Di bawah rata-rata	Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua Barat
III	Di bawah rata-rata	Di bawah rata-rata	Bangka Belitung, Kepulauan Riau Banten, NTB
IV	Di bawah rata-rata	Di atas rata-rata	Maluku Utara dan Papua

Sumber: Hasil Olahan

Dampak Indeks Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi model ini menggunakan analisis

regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Panel Two-Stage* EGLS secara ringkas disajikan dalam Tabel 3. Penggunaan metode Fixed Effect didasarkan hasil Uji Hausman yang tidak signifikan pada taraf 5 persen, artinya terdapat korelasi antara efek

individu dengan variabel bebas sehingga penggunaan *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Model 1 dan 2 menggunakan variabel rata-rata lama sekolah laki-laki (LNMYSLK), rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki (RED), kontribusi angkatan kerja perempuan (SHAREAKPR), investasi (LNINV), pertumbuhan penduduk (POPGRO), keterbukaan perdagangan (LNOOPENNESS), PDRB riil perkapita initial (LNKAPITAt-1), tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (LNMACT), rasio tingkat partisipasi perempuan terhadap laki-laki (RACT) selama tahun 2003-2012 di 30 provinsi. Model 3 menggunakan variabel rasio IPG terhadap IPM (RASIO), investasi (LNINV), pertumbuhan penduduk (POPGRO), keterbukaan (LNOOPENNESS), PDRB riil perkapita initial (LNKAPITAt-1) selama 2005-2011 di 30 provinsi. Ketiga model pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai F statistik signifikan pada taraf 1 persen berarti model layak digunakan karena mampu menjelaskan keragaman variabel tak bebas.

Variabel yang memengaruhi pertumbuhan adalah pertumbuhan penduduk, keterbukaan perdagangan (*openness*), rata-rata lama sekolah laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki, kontribusi angkatan kerja perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki, rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki, dan rasio (IPG/IPM). Variabel yang memiliki pengaruh terbesar adalah pendidikan sebagai modal manusia yang diproksi dari rata-rata lama sekolah laki-laki. Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hipotesis teori pertumbuhan endogen yang menyatakan modal manusia sebagai sumber pertumbuhan yang terpenting. Kenaikan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja dan akan memengaruhi produktivitas melalui cara produksi lebih efisien. Beberapa penelitian sebelumnya juga menghasilkan temuan yang serupa, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan memiliki arah positif (Balioune-Lutz dan McGillivray, 2007).

Tabel 3 Hasil Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Model 1	Model 2	Model 3
	Koefisien	Koefisien	Koefisien
C	-23,888	-41,757	-7,697
LNKAPITAt-1	-0,825	-0,457	-0,792
LNINV	0,241	0,175	0,437
LNOOPENNESS	0,932 **	0,877 **	1,544 ***
POPGRO	0,091 ***	0,092 ***	0,084 ***
LNMYSLK	8,426 ***	9,108 ***	
RED	7,262 *	6,339	
SHAREAKPR	0,061 *		
LNMACT		4,037 *	
RACT		2,317 *	
RASIO			8,164 ***
F-statistic	14,667 ***	15,888 ***	11,137 ***
R-squared	0,668	0,692	0,684
Adjusted R-squared	0,622	0,648	0,623

Keterangan: *signifikan pada taraf 10 persen ** pada taraf 5 persen dan *** pada taraf 1 persen

Sumber: Hasil Olahan

Pendidikan diproksi dengan rata-rata lama sekolah laki-laki, secara implisit mengasumsikan bahwa peningkatan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dengan memperluas kesempatan pendidikan kepada perempuan, tidak akan mengurangi pendidikan laki-laki (karena rata-rata lama sekolah laki-laki dianggap tetap). Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa gap pendidikan perempuan dan laki-laki semakin rendah. Hal ini tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 1,72 persen tiap tahun selama kurun waktu 2003-2012. Peningkatan pendidikan perempuan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja perempuan. Schultz (1995) menyatakan bahwa memperluas kesempatan pendidikan bagi wanita sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi karena empat alasan, yakni sebagai berikut:

1. tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki di negara berkembang
2. peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya menaikkan produktivitasnya di sektor pertanian dan industri, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak
3. kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi mendatang
4. karena perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang, maka perbaikan yang

signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.

Analisis ini juga sejalan dengan penelitian Klasen dan Lemanna (2009). Penelitiannya menunjukkan ketimpangan gender dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia memasuki tahap bonus demografi, yang hanya dapat dinikmati sekali saja. Bonus demografi yang besar berupa penduduk usia produktif berusia 15 hingga 65 tahun mampu menopang kegiatan ekonomi. Populasi penduduk yang sangat besar ini dapat menjadi berkah untuk perekonomian Indonesia jika dapat memanfaatkan secara optimal momen bonus demografi dengan sumber daya manusia terdidik dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan. Bonus demografi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2000 dan puncaknya pada tahun 2025.

Kontribusi angkatan kerja perempuan signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Semakin tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan umumnya naik turun, sehingga peningkatannya dari tahun ke tahun cukup sedikit. Hasil Survei Angkatan Kerja Agustus (Sakernas) 2012 menunjukkan angkatan kerja perempuan mencapai 37,92 persen dari seluruh angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2003 angkatan kerja perempuan sebesar 37,13 persen. Kenaikannya sangat sedikit karena angkatan kerja perempuan cenderung naik turun,

penyebabnya antara lain karena faktor sosial, demografis, dan budaya. Misalnya stereotype peran perempuan yang menempatkan mereka pada tuntutan untuk tetap memerankan tugas domestik, peran ganda. Sedangkan lelaki ditempatkan sebagai pekerja nafkah dan pekerja publik. Akibatnya banyak perempuan yang bekerja di lingkup rumahtangga atau di lahan pertanian milik keluarga, menganggap pekerjaannya sebagai perpanjangan pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan (Hubies, 2010).

Sakernas 2012 menunjukkan bahwa umumnya tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian. Tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian sebesar 34,48 persen, perdagangan sebesar 27,81 persen, dan jasa sebesar 19,17 persen. Penurunan lapangan kerja di sektor pertanian setiap tahun terjadi, ini berdampak pada tenaga kerja perempuan juga. Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Di antara ketiga sektor tersebut ternyata peningkatan tenaga kerja perempuan di sektor jasa lebih tinggi dibanding sektor industri dan perdagangan. Pada sektor jasa, perempuan lebih cepat untuk menekuni dan mengembangkan karirnya. Sektor jasa lebih fleksibel bagi wanita, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat

dilakukan. Sektor jasa memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar dibanding dengan sektor yang lain. Adanya fleksibilitas dalam bekerja di sektor informal, sehingga perempuan lebih sesuai bekerja di dalamnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Angkatan kerja merupakan salah satu modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menurut teori ekonomi Solow dan endogen. Peningkatan angkatan kerja juga harus diikuti dengan peningkatan pendidikan guna mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2008-2012 ada peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan SLTP ke atas, sementara mereka yang berpendidikan SD atau lebih rendah semakin menurun. Walaupun demikian, angkatan kerja berpendidikan SD masih mendominasi, yaitu sebesar 47,36 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya produktivitas angkatan kerja di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, peningkatan kualitas angkatan kerja juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi terutama universitas dengan rata-rata peningkatan 11,95 persen per tahunnya.

Tabel 4 Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan

Pendidikan	2008			2010			2012		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
≤ SD	49,63	55,29	51,79	47,19	50,96	48,64	45,37	50,63	47,36
SLTP+SLTA	44,14	36,12	41,07	45,87	39,10	43,28	46,75	38,62	43,67
PT	6,23	8,59	7,14	6,93	9,94	8,09	7,88	10,75	8,97
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angkatan kerja diproksi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki. Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Peningkatan rasio ini berarti berkurangnya gap antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Pertama, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana perempuan diberi keleluasaan dan kesempatan yang luas untuk bekerja. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan tidak mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, asumsi tingkat partisipasi laki-laki tetap. Kedua, karena peningkatan pendidikan perempuan sehingga membuka peluang bagi mereka untuk bekerja dan berkarir. Selama periode 2008-2012 angkatan kerja perempuan dengan tingkat pendidikan sekolah dasar dan di bawahnya (52,78 persen), diploma (4,02 persen), dan universitas (5,73 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki. Persentase angkatan kerja perempuan berpendidikan SLTP dan SLTA lebih rendah dibanding laki-laki.

Seguino (2008) menyatakan bahwa perluasan kesempatan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara dalam perdagangan internasional. Kesempatan kerja yang besar bagi perempuan juga akan meningkatkan bargaining power mereka dalam keluarga dalam pengambilan keputusan (baik sebagai istri atau anak dalam keluarga maupun sebagai warga negara dalam konteks masyarakat/negara). Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku menabung dan investasi ekonomi baik non ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak yang akan meningkatkan modal manusia generasi mendatang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam

pendidikan dan pekerjaan bukan hanya besaran materi (barang dan jasa) untuk mendongkrak ekonomi keluarga, melainkan juga terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan serta terbentuknya generasi bangsa yang berkualitas.

Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio (IPG/IPM). Rasio (IPG/IPM) menggambarkan gap dalam capaian kapabilitas dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa rasio (IPG/IPM) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif, berarti semakin tinggi rasio (IPG/IPM) maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki tetapi juga penduduk perempuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan banyak studi tentang hubungan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi walaupun menggunakan variabel penjelas ketimpangan gender yang berbeda-beda, seperti hasil penelitian Aktaria dan Handoko (2012), Klasen dan Lamanna (2009), Bali moune-Lutz dan McGillivray (2007)

PENUTUP

Hasil analisis deskriptif menunjukkan masih terdapat ketimpangan gender di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mampu mengurangi gap secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Gap antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya, dimana rasio (IPG/IPM) masih tetap berada pada kisaran 93 persen selama periode 2004-2011.

Hasil estimasi model pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data

panel menunjukkan bahwa indeks ketimpangan gender yang diproksi dengan rasio (IPG/IPM) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki tetapi juga penduduk perempuan.

Untuk menurunkan ketimpangan gender tidak lepas dari peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang memprioritaskan peningkatan kesehatan dan pendidikan serta mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan baik dalam peran sosial maupun ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan permasalahan gender dalam setiap program dan kegiatannya, termasuk didalamnya pendataan yang lebih spesifik gender dan usia sehingga perencanaan kebijakan terkait pembangunan gender menjadi lebih tepat sasaran.

Pemerintah harus mempertimbangkan efek pengukuran indeks ketimpangan gender juga berdampak pada ketimpangan gender di pekerjaan. Ada banyak jenis pekerjaan perempuan yang tidak dimasukkan dalam penghitungan seperti pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Penghitungan ukuran ketimpangan gender sebaiknya memperhitungkan nilai imputasi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga khususnya di negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktaria, E. dan Handoko, B. (2012). "Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13(2): 194-206.
- Bali moune-Lutz, M. and Gillivray, M. (2007). "Gender inequality and growth: Evidence from Sub-Saharan Africa and Arab countries". *African Development Review*. 21(2): 224-242
- Baltagi B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data 3rd Edition*. Chicester (UK): John Wiley & Son.Ltd.
- BPS. (2003-2012). *Data dan Informasi Angkatan Kerja*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2003-2012). *Data dan Informasi Pendidikan*. BPS. Jakarta
- Gujarati DN. (2004). *Basic Econometrics (4th Edition)*. New York: McGraw Hill.
- Hubies, Aida Vitayala S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik. (2010). *Ketimpangan Gender dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia di Indonesia*. Jakarta.
- (2011). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta.
- (2012). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta.
- Klasen, S. and Lamanna, F. (2009). "The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries". *Feminist Economist*. 15(3): 91-132.
- Lucas, Robert E. (1988). "On The Mechanics of Economic Growth". *Journal of Development Economics*. 22: 3-42.
- Martin, R.D., dan Garvi, M.G. (2009). Gender Inequality and Economic Growth in Spain: An Exploratory Analysis. *The Review of Regional Studies*. 39(1): 23-48.

- McKinsey Global Institute. (2012). *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. Jakarta: McKinsey Global Institute.
- Seguino, Stephanie. (2008). "Micro-macro linkages between gender, development, and growth: Implications for the Caribbean region". *Journal of Eastern Caribbean Studies*. 33(4): 8–42.
- Schultz, P. (1995). *Investment In Women's Human Capital*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan). Jakarta: Erlangga.
- United Nation Development Programme. (2010). *Human Development Report: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. New York, USA: UNDP.
- World Bank. (2012). *Gender and Development in East and South Asia*. Washington, DC: World Bank.